BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati Dairi wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain;
4. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevalusi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur (*normatif dan kwantitatif*) sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan organisasi Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (*SKPD);*
5. Kinerja adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan kegiatan yang dilaksankan sesuai dengan program yang ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD)*;
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi, yaiutu hasil pengukuran kinerja dan indentifikasi, analisis serta atisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, berupa tindakan pengerahan sumber daya antara lain: Sumber Daya Manusia, Barang Modal termasuk Peralatan dan Teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis/organisasi instansi Pemerintah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup IKU Pemerintah Kabupaten Dairi meliputi indikator kinerja utama seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi.
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB IV
FUNGSI

Pasal 4

IKU Pemerintah Kabupaten Dairi berfungsi sebagai berikut:

a. pedoman penyusunan rencana kinerja;
b. pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran;
c. pedoman penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. pedoman evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2009- 2014.

BAB V
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Pimpinan SKPD wajib melakukan :

a. pembinaan dalam pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing; dan
b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 6

(1) Evaluasi pelaksanaan IKU Pemerintah Kabupaten Dairi dilakukan oleh Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa hambatan maupun informasi yang dianggap relevan.

Pasal 7

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

(2) IKU Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Februari 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 57 TAHUN 2012
TANGGAL : 24 Februari 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1	BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Mutu Anak Didik
			2. Kualifikasi & Kompetensi Tenaga Pendidik
			3. Partisipasi Pendidikan
			4. Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan Masyarakat
			5. Sarana Pendidikan
			6. Pelayanan Pendidikan Non Formal
			7. Capaian Jumlah Perawat Pemula Yang Terampil Dan Berkompeten
2	BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat di Puskesmas
			2. Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang
3	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	A. Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita
			2. Cakupan Penguatan cadangan pangan
		B. Meningkatnya Distribusi Dan Akses Pangan	1. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
			2. Stabilitas harga dan pasokan pangan
		C. Meningkatnya Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan	1. Persentase pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			2. Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
		D. Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Binaan
		E. Meningkatnya produksi pertanian, ternak dan ikan	1. Produksi padi / tahun
			2. Persentase peningkatan produksi padi dari tahun 2009
			3. Produksi jagung/ tahun
			4. Persentase peningkatan produksi jagung dari tahun 2009
			5. Cakupan luas intensifikasi lahan

1	2	3	4
			6. Ketersediaan pemenuhan kebutuhan bibit padi, jagung, kentang, bawang, kedelai, sapi, kerbau, babi, kambing, ayam, benih ikan nila, ikan mas, ikan lele, sarana pertanian (Alsintan), obat-obatan pertanian dan ternak
			7. Peningkatan pemenuhan :
			- Rehabilitas jaringan irigasi
			- Jalan usaha tani
			- Jalan produksi
			8. Frekuensi kunjungan pembinaan kelompok tani dengan latihan kunjungan supervise perminggu/ PPL
			9. Jumlah balai penyuluh pertanian
			10. Jumlah petugas medis kesehatan hewan (dokter hewan)
			11. Jumlah tenaga penyuluh
			12. Jumlah Balai Benih Ikan
			13. Jumlah kelembagaan badan pelaksana penyuluh pertanian
			14. Jumlah kendaraan sepeda motor
			15. Jumlah kendaraan roda empat
			16. Penyerapan metoda penyuluhan pertanian melalui :
			- demplot
			- kursus tani
			- studi banding
			17. Kelembagaan agribisnis pedesaaan (jumlah kelembagaan petani yang dibina)
			18. Pembentukan kelompok tani baru (pemula)
			19. Persentase peningkatan kelompok tani pemula menjadi lanjut
			20. Persentase peningkatan kelompok tani lanjut menjadi madya
			21. Peningkatan populasi ternak dan ikan/ tahun
4	**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	A. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Sumber Air	1. Persentase jumlah sumber air di hutan lindung yang dilindungi
			2. Persentase jumlah mata air di luar hutan lindung yang dilindungi
			3. Jumlah kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga (minimal 1 kawasan)
		B. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Jumlah usaha dan atau kegiatan menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air
		C. Meningkatnya Pelayanan Pemulihan Pencemaran Air Pada Sumber Air	Jumlah sumber air yang telah dipulihkan akibat pencemaran air

1	2	3	4
		D. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara	1. Ketersediaan 10 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas
			2. Jumlah kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten Dairi yang dipantau emisinya
			3. Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten Dairi dipantau emisinya
			4. Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
			5. Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		E. Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti
5	**BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG**	A. Meningkatnya Jumlah Dan Mutu Jaringan Jalan Dan Jembatan Menuju Lokasi Permukiman Penduduk, Kantong-Kantong Pertanian Dan Sentra Produksi	1. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten
			2. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan
			3. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat
			4. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
		B. Meningkatnya Prioritas Utama Penyediaan Air Untuk Kebutuhan Masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
			2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
			3. Ketersediaan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60liter/orang/hari
		C. Meningkatnya kualitas penataan bangunan, lingkungan, sampah dan tata ruang	1. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Dairi
			2. Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
			3. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

1	2	3	4
			4. Jumlah penyelesaian tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
			5. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% dari luas wilayah kota
		D. Meningkatnya Penanganan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
			2. Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
		E. Meningkatnya Penerimaan Asli Daerah	Capaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)/tahun
6	**BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK**	A. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor Secara Terpadu Untuk Pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kab. Dairi	1. Penjabaran Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD)
			2. Penjabaran Program Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS)
			3. Dokumen Perencanaan :
			- Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD)
			- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD)
			- KUA dan PPAS APBD
			4. Rancangan Perda RTRW
			5. Peta Administrasi Kecamatan
			6. Ketepatan waktu
			a. Penyusunan RKPD
			b. Penyusunan KUA & PPAS P. APBD 2010
			c. Penyusunan KUA & PPAS APBD 2011
		B. Meningkatnya Ketersediaan Data Daerah	Penyusunan Buku Statistik Daerah
7	**BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA KECIL MENENGAH**	A. Meningkatnya Kualitas Usaha Industri Kecil	1. Jumlah industri kecil makanan ringan
			2. Jumlah industri kerajinan anyaman
			3. Jumlah perusahaan yang memiliki izin industri
			4. Jumlah produk andalan yang dipromosikan
			5. Jumlah jenis promosi pengembangan produk lokal
		B. Meningkatnya Kualitas Usaha Dagang Dan Niaga	1. Jumlah perusahaan yang memiliki SIUP/TDP
			2. Jumlah perusahaan yang memiliki surat izin pupuk bersubsidi
			3. Jumlah perusahaan yang memiliki izin pangkalan minyak tanah

1	2	3	4
		C. Meningkatnya Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sehat	1. Jumlah koperasi yang berbadan hukum
			2. Jumlah koperasi yang memiliki unit usaha
			3. Jumlah koperasi yang memiliki modal di atas Rp. 1 miliar
			4. Jumlah koperasi yang memili modal di bawah Rp. 1 miliar
			5. Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu
		D. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Capaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)/tahun
8	**BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Capaian jumlah masyarakat memiliki:
			a. Kartu Keluarga
			b. Kartu Tanda Penduduk
			c. Akte
			2. Data Base Kependudukan yang dimutahirkan setiap tahun
			3. Jumlah Surat Keterangan Pindah (SKP)
9	**BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL**	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Sosial bagi PMKS	1. Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
			2. Persentase (%) PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
			3. Persentase (%) Panti Sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial.
			4. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraah Sosial.
			5. Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan Sosial selama masa tanggap darurat.
			6. Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
			7. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial.
		Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan	1. Cakupan Tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi
			2. Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.
			3. Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
			4. Cakupan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
			5. Cakupan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
			6. Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program jamsostek
			7. Cakupan Pemeriksaan Perusahaan
			8. Cakupan Pengujian Peralatan di Perusahaan

1	2	3	4
10	**BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**	Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya Daerah	1. Pembinaan Seni Budaya
			a. Seni / Musik
			b. Budayawan / Sejarah
			c. Pelatihan / Sosialisasi Kepada Pembuat Makanan Ciri Khas Daerah
			d. Pelatihan / Sosialisasi Kepada Pelaku Cerita / Legenda Rakyat
			2. Ketersediaan Sanggar Seni,Budaya dan Musik
			3. Ketersediaan Alat-alat Seni Musik – Budaya
			4. Berdirinya Open Stage untuk Pengembangan Bakat Para Seniman/Budayawan
			5. Terpeliharanya Benda Cagar Alam
			6. Terpeliharanya Benda Cagar Budaya
			7. Ketersediaan Dokumen Legenda dan Cerita Rakyat
			8. Adanya Museum Tempat-tempat Benda Bersejarah
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Perizinan Usaha Sektor Pariwisata
			2. Retribusi Memasuki Kawasan Daerah Wisata dan Pemanfaatan Fasilitas di Tempat Wisata.
		Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan	1. Cakupan Pemuda yang Mendapat Pendidikan Bela Negara
			2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan
			3. Cakupan Kompetisi dan Apresiasi Pemuda
			4. Cakupan Peluang Kerja Sesuai Potensi dan Keahlian yang dimiliki
			5. Cakupan Kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			6. Cakupan Penyiapan Kader Pemuda
			7. Cakupan Pendampingan Pemuda
			8. Cakupan Kesempatan Memperoleh dan Meningkatkan Pendidikan Serta Keterampilan
		Meningkatnya Usaha Pemasyarakatan Olahraga	Frekwensi Pembinaan Cabang / Club Olahraga (Usia : 13 – 16 Tahun) yakni:
11	**BIDANG PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan
		Meningkatnya Akses Publik Terhadap Arsip Statis	1. Jumlah judul buku
			2. Jumlah perpustakaan desa
			3. Frekwensi mobil perpustakaan keliling/mobil pintar
			4. Ketersediaan arsip

1	2	3	4
12	**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**	Meningkatnya Pengarusutamaan Jender dalam seluruh Kegiatan Sektor Pembangunan	1. Persentase sektor yang mempunyai perencanaan dan penyusunan program untuk mengurangi/ menghilangkan kesenjangan yang berbasis jender
			2. Persentase sektor yang dinilai responsif jender dalam pelaksanaan programnya
		Meningkatnya Upaya Menumbuhkembangkan Kepekaan Dan Kesadaran Jender Di Masyarakat	1. Jumlah pertemuan pemasyarakatan kesetaraan dan keadilan jender dalam setahun
			2. Jumlah pemasyarakatan kesetaraan dan keadilan jender melalui media massa cetak dan elektronik dalam setahun
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Di bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi	1. Persentase jumlah ibu hamil per tahun
			2. Jumlah kematian ibu melahirkan per tahun
			3. Persentase peserta KB laki-laki dalam setahun
			4. Persentase sektor yang mempunyai program responsif jender
			5. Persentase pengusaha perempuan berbanding laki-laki per tahun
			6. Jumlah peraturan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan
		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak Dalam Perlindungan Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Hak Anak Serta Penghapusan Berbagai Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja	1. Persentase bayi KEP per tahun
			2. Persentase gizi buruk per tahun
			3. Persentase anak (< 1 tahun) diimunisasi per tahun
			4. Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak anak per tahun
			5. Jumlah peraturan daerah yang diterbitkan untuk mendukung kualitas hidup anak
			6. Jumlah kekerasan terhadap anak per tahun
			7. Persentase pekerja anak < 15 tahun
		Meningkatnya Pelayanan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun
			2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
			3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*
			4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- Keluarga Berencana
			5. Cakupan Pasangan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri
			6. Rasio Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana
			7. Rasio petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
		Meningkatnya Ketersediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
		Meningkatnya Ketersediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa

1	2	3	4
13	**BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas pengguna dan angkutan jalan	1. Jumlah angka kecelakaan lalu lintas
			2. Jumlah traffic light
			3. Jumlah warning light
			4. Jumlah rambu-rambu lalu lintas
			5. Jumlah marka jalan
			6. Jumlah zebra cross jalan
			7. Jumlah deleniator jalan
			8. Jumlah pagar pengaman jalan
			9. Jumlah RPPJ (Rambu Petunjuk Pengguna Jalan)
			10. Jumlah papan nama jalan
			11. Jumlah izin usaha angkutan
			12. Jumlah izin trayek
			13. Jumlah izin galian kabel telekomunikasi (Kabupaten)
			14. Jumlah ijin agen jasa titipan
			15. Jumlah izin warnet
			16. Jumlah pengujian kendaraan bermotor
			17. Jumlah terminal yang dibutuhkan
			18. Jumlah dermaga yang ada
			19. Jumlah kendaraan dinas angkutan penumpang / barang
			20. Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi penguji kendaraan
			21. Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi PPNS
			22. Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi manajemen terminal
		Meningkatnya ketersediaan informasi Publik dan pembangunan	Rasio media komunikasi yang ada untuk efektifitas penyebaran informasi
		Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi pemerintah dan Kab. Dairi dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Rasio infrastruktur komunikasi/telekomunikasi/ IT terhadap kecamatan
			2. Rasio SDM yang memenuhi kualifikasi IT
			3. Cakupan koneksi internet Dishubkominfo dengan SKPD
			4. Jumlah sekolah yang terkoneksi internet
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase retribusi parkir
			2. Persentase retribusi terminal
			3. Persentase retribusi izin trayek
			4. Persentase retribusi pengujian kendaraan bermotor

1	2	3	4
14	**BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**	Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta pemahaman politik masyarakat	Jumlah aktifitas pembinaan kesatuan bangsa dan politik
		Menurunnya tingkat gangguan sosial di masyarakat	Jumlah gangguan sosial yang terjadi
			- Konflik sosial yang terjadi
			- Jumlah anggota masyarakat yang memahami metode penanggulangan bencana
15	**BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang Baik	*Bidang Pemerintahan*
			1. Pembahasan Ranperda
			2. Jumlah Peraturan Daerah
			3. Jumlah Peraturan Bupati
			4. Jumlah Keputusan Bupati
			5. Hearing/dialog dan koordinasi dengan legislatif , tokoh masyarakat dan tokoh agama
			6. Sidang paripurna
			7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			8. LKPJ tepat waktu
			9. LPPD tepat waktu
			10. LAKIP tepat waktu
			11. ILPPD tepat waktu
			Bidang Kepegawaian
			1. Data base kepegawaian
			2. Kenaikan pangkat tepat waktu
			3. Pendidikan dan Pelatihan
			- Prajabatan
			- Sileksi Diklat Pim III dan Pim IV
			Bidang Keuangan
			1. Penerimaan Asli Daerah
			2. Dana perimbangan
			3. Lain-lain pendapatan yang sah
			4. Data base sumber-sumber PAD
			5. Penetapan APBD tepat waktu
			6. Penetapan penjabaran APBD tepat waktu
			7. Tutup buku tepat waktu
			8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
			9. Buku Inventaris Barang

1	2	3	4
			10. Data base barang daerah
			Bidang Pengawasan
			1. Frekuensi Pemeriksaan Reguler
			2. Jumlah penyelesaian temuan dan rekomendasi
16	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa Dan Kapasitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan Dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan Yang Partisipatif Dan Demokratis	1. Desa yang telah memiliki kantor Kepala Desa
			2. Desa yang telah memiliki Unit Balai Desa
			3. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa
			4. Peraturan Desa tentang APB Desa
			5. Dokumen tentang Pertanggungjawaban APB Desa
			6. Desa yang memiliki Data Aset Desa
			7. Jumlah lembaga Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa
			8. Desa / Kelurahan yang memiliki monografi/profil Desa/Kelurahan
			9. Jumlah Pemekaran Desa
			10. Pembinaan Kelompok Kader Posyandu
			11. Jumlah Ranperda Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa
			12. Usaha Ekonomi Desa yang mampu berperan aktif
			13. Kelompok usaha simpan pinjam desa
			14. Peraturan Desa yang mengatur pengelolaan potensi desa
			15. Wartekdes yang telah dibentuk
			16. Wartekdes yang berperan aktif
			17. Posyantekdes yang telah dibentuk
			18. Lumbung pangan desa yang berfungsi
			19. Rencana Pembangunan Desa
			20. Tingkat rata-rata musyawarah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
			21. Swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
17	**BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Yang Baik Dan Benar	1. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP)
			2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Tambang (IUJP)
			3. Retribusi IUP
			4. Pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan komoditas batuan
			5. Pengusaha tambang yang diberi sanksi administrasi
			6. Pengurangan lokasi Penambangan tanpa Izin

1	2	3	4
			7. Laporan pengusaha pertambangan
			8. Perusahaan patuh membayar Penerimaan Negara Bukan sektor Pertambangan tepat waktu
			9. Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batuan
			10. Papan Informasi
		Meningkatnya ketersediaan air bersih dan mitigasi bencana alam geologi	Sumur bor beserta fasilitasnya
		Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik Dan Bahan Bakar Minyak Serta Pemanfaatan Energi Secara Efisien	1. Jumlah listrik tenaga surya
			2. Masyarakat yang ikut konversi minyak tanah ke LPG 3 kg
			3. Distribusi BBM bersubsidi
18	**BIDANG KEHUTANAN**	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Optimalisasi Lahan Perkebunan	1. Tersedianya DAM Pengendali Untuk Konservasi Tanah dan Air
			2. Cakupan Luas Lahan Kritis (36.819 Ha)
			3. Jumlah Bibit Yang Tersedia
			4. Jumlah Bibit Yang Ditanam

SIDIKALANG, 24 Februari 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO